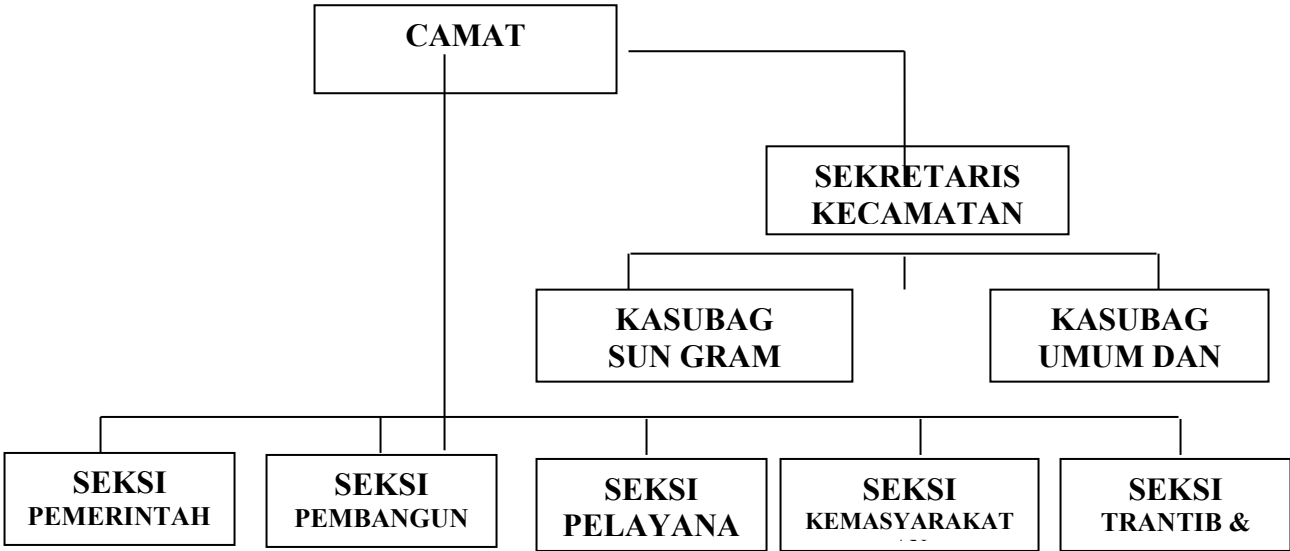


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024



KANTOR KECAMATAN PACET
KAB. MOJOKERTO

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN PACET



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pacet Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Pacet, Januari 2025
CAMAT PACET



NIP. 19690422 198903 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Stuktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II Perencanaan Kinerja	7
A. Rencana Kinerja Tahunan	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III Akuntabilitas Kinerja	10
A. Capaian Kinerja	10
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV Penutup	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran	23
Lampiran-lampiran	
1. Matriks Renstra Kecamatan Pacet 2021 – 2024	
2. Matriks Renja Kecamatan Pacet Tahun 2024	
3. Matriks Renja Kecamatan Pacet Tahun 2024	
4. IKU Kecamatan Pacet	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2024	
9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2024	
10. Struktur Organisasi	
11. Laporan Kinerja JFU	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Pacet mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Pacet juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Pacet berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km² yang terdiri dari 2.276,181 km² lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah

Kecamatan Pacet terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Pacet sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pacet
- Sebelah Timur : Kecamatan Trawas
- Sebelah Selatan : Kota Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Gondang

PETA WILAYAH KECAMATAN PACET



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Pacet mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Pacet berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Pacet diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Pacet.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang

telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pacet.

2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2023, Kecamatan Pacet masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 7 orang pegawai.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas kurang memadai seperti bangunan kantor kondisinya banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Pacet dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Pacet termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Pacet ;
3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
4. Masih adanya aparaturnya yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Pacet selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Pacet Tahun 2016 – 2023 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Pacet pada tahun 2023 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PACET

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1. IKM Kecamatan	95,52
2.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
3.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
4.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45 (A)
		4.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%
		4.3 Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
5.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	5. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

RKT HASIL PERBAIKAN/REVIU TAHUN 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.413.414.000	PAPBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 27.000.000	PAPBD 2024
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 200.272.000	PAPBD 2024

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN PACET

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	95,52
NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP kecamatan		81,45 (A)
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		91%
		Indeks Profesionalitas ASN		82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	Rp. 2.413.414.000	PAPBD 2024
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	Rp. 27.000.000	PAPBD 2024
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	Rp. 200.272.000	PAPBD 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pacet Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Pacet Tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pacet Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	97,5	95,52	95,52%
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %	81 %	100%
		1.3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	700 pelayanan	700 pelayanan	100%
		1.4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	81 %	81 %	100%
		1.5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24 fasilitasi	24 fasilitasi	24 fasilitasi
		1.6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 fasilitasi	24 fasilitasi	24 fasilitasi
		1.7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	30 fasilitasi	17 fasilitasi	17 fasilitasi

2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi	66	66	100 %
		2.2	Nilai SAKIP	81,45	81,45	100 %

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 Strategis 1

Sasaran pertama indikator pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan pada Kecamatan Pacet dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 99 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran 1 Strategis 2

Sasaran pertama indikator kedua yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Pacet dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 99,67%. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD Kecamatan Pacet pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Jatirejo Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	100%	81	81	100%	88	88	100%	91,96	95,25	103,58%
2	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80	80	100%	81	81	100%	100	100	100%	100	100	100%
3	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81	81	100%	80	80	100%	81	81	100%	100	100	100%
4	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	77	100%	81,04	81,04	100%	81	81,74	100%	81,8	81,45	99,57%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95	95	100%	95	95	100%	96	92,18	96%	91	94,42	103,76%
		Indeks Profesionalitas ASN	55	55	100%			100%	85	85	100%	82	78,71	95,99%
5	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	Jumlah inovasi	1	1	100%	2	2	100%	2	2		2	2	100%

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	91,96	95,25	
	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	
	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	100%	100%	
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,8	81,45	
	Persentase Indikator Program Perangkat Dearah yang Tercapai	100%	100%	
	Persentase Realiasasi Anggaran Perangkat Daerah	91%	94,42%	
	IP ASN Perangkat Daerah	82	78,71	

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Realisasi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI Pemda	KET
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	95,25	89,97	
	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	-	
	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	82%	-	
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	-	
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		-	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.45	74,42	
	Persentase Indikator Program Perangkat Dearah yang Tercapai	100%	-	
	Persentase Realiasasi Anggaran Perangkat Daerah	94,42%	-	
	IP ASN Perangkat Daerah	78,71	85	

d) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pacet maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 2.668.308.300 (*Dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi sebesar Rp 2.668.308.300; dan
2. Belanja modal sebesar Rp. 0

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

URUSAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET KINERJ A	REALISAS I KINERJA	ALOKASI ANGGARA N (Rp.)	REALISASI ANGGARA N (Rp.)
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(-)	nilai	81.55	81.55	2.438.086.600	2.290.135.667
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target(%)	%	82	100%	12.500.000	12.500.000
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	Dokumen	8	100%	7.500.000	7.500.000
	1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	Dokumen	30	100%	5.000.000	5.000.000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	%	100	100%	2.190.686.000	2.044.006.479
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang)	Orang	20	100%	2.190.686.000	2.044.006.479
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat DAERAH	Indeks	81	100%	85.000.600	84.897.000

	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	%	82	100%	85.000.600	84.897.000
	4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	Paket	1	100%	2.799.750	2.799.750
	4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)	Paket	1	100%	0	0
	4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	Paket	12	100%	27.500.000	27.470.000
	4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	Paket	3	100%	7.000.000	6.999.800
	4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan(dokumen)	Dokumen	1	100%	3600000	3.528.000
	4.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	Paket	1	100%	22.500.000	22.499.450
	4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Laporan	12	100%	21.600.000	21.600.000
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)	%	100	100%	93.500.000	93.114.438
	5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	Laporan	12	100%	26.000.000	25.614.438
	5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	Laporan	12	100%	67.500.000	67.500.000
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	%	100	100%	56.400.000	55.617.750

	6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(unit)	unit	2	100%	25.000.000	24.640.000
	6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)	Unit	2	100%	26.400.000	26.397.750
	6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	Unit	30	100%	5.000.000	26.397.750
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	%	83	100%	20.699.400	20.489.200
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)	Laporan	275	100%	20.699.400	20.489.200
	1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan(laporan)	Laporan	4	100%	20.699.400	20.489.200
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)	%	82	100%	209.522.300	208.895.500
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(fasilitasi)	Dokumen fasilitasi	53	100%	209.522.300	208.895.500
	1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(dokumen)	Dokumen	8	100%	37.400.000	37.000.000
	1.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(dokumen)	dokumen	9	100%	20.000.000	19.999.900
	1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(dokumen)	Dokumen	17	100%	42.740.000	42.619.000

1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	Dokumen	19	100%	109.382.300	109.276.600
----	--	---	---------	----	------	-------------	-------------

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Kecamatan Pacet tahun 2024 sebesar 94,42% dengan realisasi sebesar Rp **2.519.520.367,00** Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Kecamatan Pacet tahun 2024 termasuk kategori Sangat tinggi

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Bappeda sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	%
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1. IKM Kecamatan	Rp. 27.000.000	10,20
3.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Rp. 200.272.000	
4.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.413.414.000	89,80
		4.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
		4.3 Indeks Profesionalitas ASN		
5.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan	5. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN	100%	98,83%	1,17%
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	100%	99,16%	0,84%

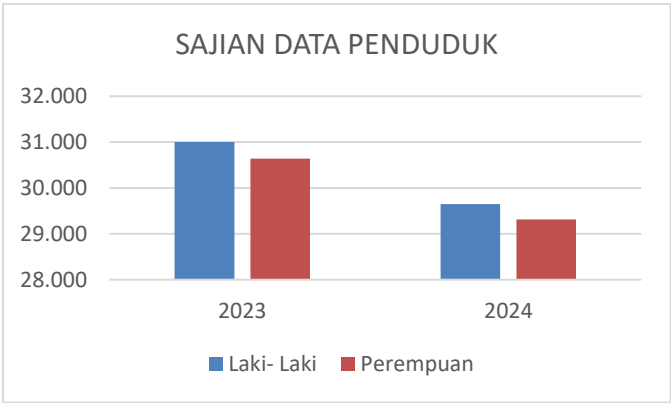
PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8

Persentase Penduduk Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 – 2024

Tahun	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2023	31.001	30.642	61.643	98.84
2024	29.649	29.316	58.965	98,87

Sumber : data lap kependudukan Kec. Pacet

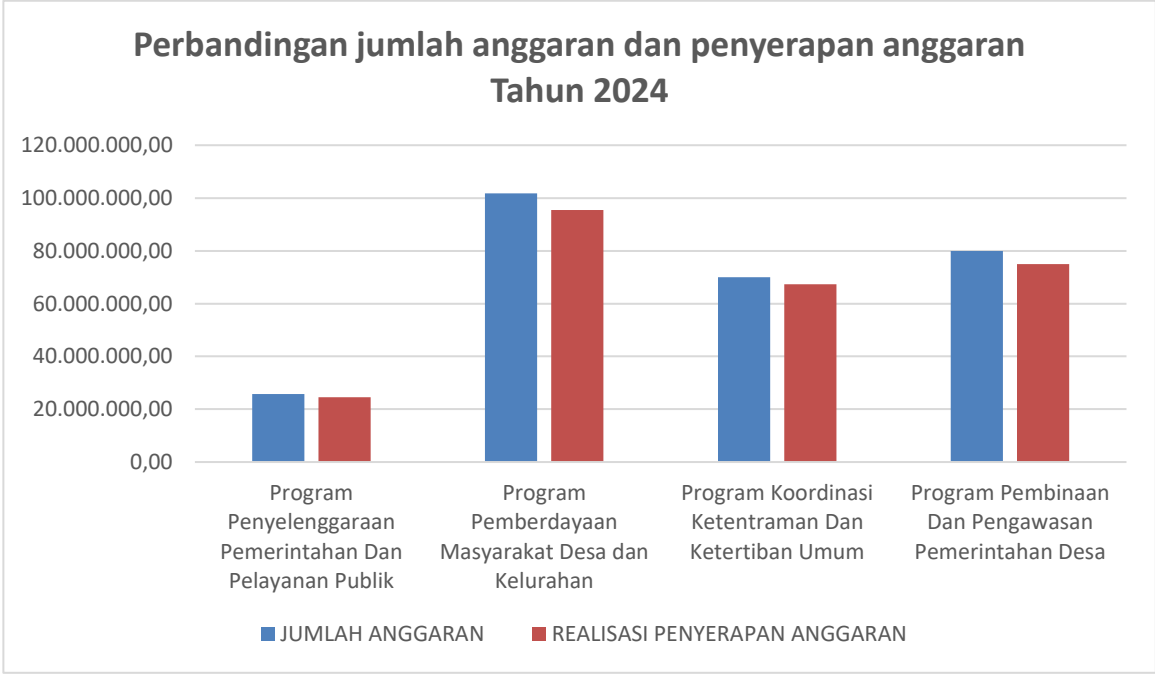


f) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.9

Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2024

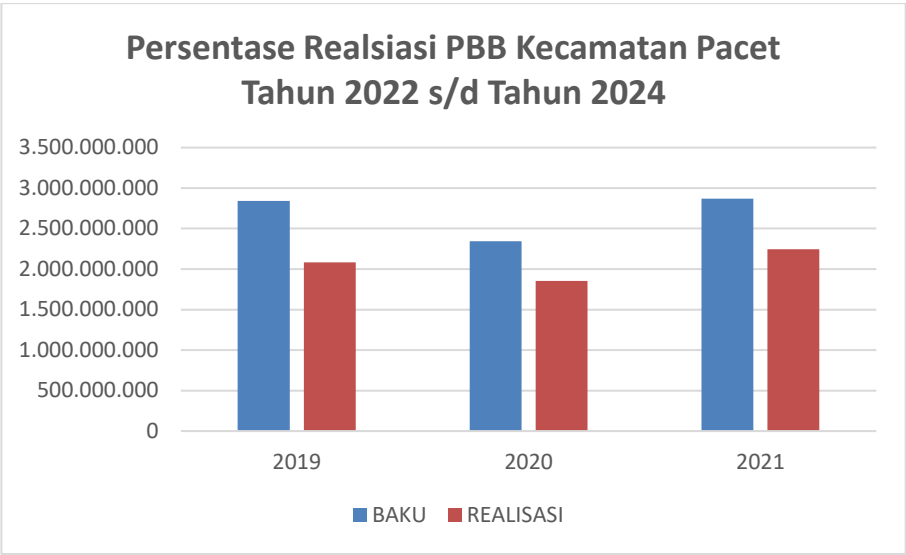
NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	37.400.000	37.000.000	98,93%
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000	19.999.900	99,99%
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.740.000	42.619.000	99,71%
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	109.382.300	109.276.600	99,90%



Tabel 3.10

Persentase Realsiasi PBB Kecamatan Pacet Tahun 2022 s/d Tahun 2024

	TAHUN	BAKU	REALISASI	%
1	2022	2.839.898.659	2.084.120.416	72.80
2	2023	2.342.093.690	1.852.913.471	65.14
3	2024	<u>2.674.199.736,00</u>	<u>2.423.802.727,00</u>	90,64%



B. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Pacet Tahun 2024 sebesar Rp. 2.668.308.300,- penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.519.520.367 atau 94,42 % dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(-)	nilai	81.55	81.55		
						2.438.086.600	2.290.135.667
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target(%)	%	82	100%	12.500.000	12.500.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	Dokumen	8	100%	7.500.000	7.500.000
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	Dokumen	30	100%	5.000.000	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	%	100	100%	2.190.686.000	2.044.006.479
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang)	Orang	20	100%	2.190.686.000	2.044.006.479
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat DAERAH	Indeks	81	100%	85.000.600	84.897.000

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	%	82	100%	85.000.600	84.897.000
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	Paket	1	100%	2.799.750	2.799.750
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)	Paket	1	100%	0	0
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	Paket	12	100%	27.500.000	27.470.000
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	Paket	3	100%	7.000.000	6.999.800
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan(dokumen)	Dokumen	1	100%	3600000	3.528.000
4.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	Paket	1	100%	22.500.000	22.499.450
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Laporan	12	100%	21.600.000	21.600.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)	%	100	100%	93.500.000	93.114.438
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	Laporan	12	100%	26.000.000	25.614.438
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	Laporan	12	100%	67.500.000	67.500.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	%	100	100%	56.400.000	55.617.750

	6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(unit)	unit	2	100%	25.000.000	24.640.000
	6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)	Unit	2	100%	26.400.000	26.397.750
	6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	Unit	30	100%	5.000.000	26.397.750
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	%	83	100%	20.699.400	20.489.200
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)	Laporan	275	100%	20.699.400	20.489.200
	1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan(laporan)	Laporan	4	100%	20.699.400	20.489.200
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)	%	82	100%	209.522.300	208.895.500
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(fasilitasi)	Dokumen fasilitasi	53	100%	209.522.300	208.895.500
	1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(dokumen)	Dokumen	8	100%	37.400.000	37.000.000
	1.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(dokumen)	dokumen	9	100%	20.000.000	19.999.900
	1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(dokumen)	Dokumen	17	100%	42.740.000	42.619.000

	1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	Dokumen	19	100%	109.382.300	109.276.600
--	-----	--	---	---------	----	------	-------------	-------------

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2024, seluruh indikator kinerja yang belum mencapai 100% capaian kinerja yaitu Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap PATEN 98,18% dan Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun ; Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat mencapai 94,83%.

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun mendatang optimalisasi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Pacet Tahun 2024 sebesar Rp. 2.668.308.300,- penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.519.520.367 atau 94,42 %


CAMAT PACET
APRIANTO, SE.MM
Pembina
NIP. 19690422 198903 1 006